



Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-36: Masihkah Responsif dan Kohesif?

Oleh

A. Ibrahim Almuttaqi

Kepala Departemen Kajian ASEAN di The Habibie Center
ibrahim@habibiecenter.or.id

Pada hari Jumat ini, tanggal 26 Juni 2020, para pemimpin Asia Tenggara akan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-36. Namun karena adanya pandemi COVID-19 saat ini, Vietnam sebagai ketua tahun ini telah memutuskan bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung secara virtual. Di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik karena masalah yang sudah berlangsung lama - seperti Laut Tiongkok Selatan, perkembangan di Semenanjung Korea, dan persaingan negara adidaya antara Amerika Serikat dan Tiongkok - para pemimpin ASEAN juga harus menghadapi konsekuensi dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini telah menginfeksi sedikitnya 128,890 orang dan merenggut nyawa setidaknya 3,793 orang di Asia Tenggara.¹ Apa yang dapat diharapkan dari KTT ASEAN ke-36? Apa yang akan menjadi keterbatasan dari penyelenggaraan KTT secara virtual? Apakah ASEAN akan responsif dan kohesif?

Menjawab Keraguan Multilateralisme dan Globalisasi

Pandemi COVID-19 telah memunculkan kembali pertanyaan tentang relevansi multilateralisme dan manfaat globalisasi. Skala, ruang lingkup, dan kecepatan dimana virus corona dapat menyebar ke setiap sudut dunia telah dijadikan sebagai contoh akan bahaya yang ditimbulkan dari masyarakat yang semakin terbuka dan saling terhubung. Dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah dituduh mengadopsi mentalitas 'setiap orang untuk dirinya sendiri' ketika negara-negara bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pasokan alat pelindung diri (APD), masker, dan obat-obatan yang terbatas.

Ketidaksiapan menghadapi COVID-19, yang diantaranya ditunjukkan oleh ketergantungan Indonesia pada produsen peralatan medis asing, membuat pekerja medis di dalam negeri pada awalnya





kesulitan untuk merawat pasien dengan alat perlindungan yang tidak memadai. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar menggambarkan bahwa ketergantungan itu sebagai 'risiko yang tidak dapat diterima'.² Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda justru melangkah lebih jauh, menyerukan Indonesia untuk 'berpaling dari multilateralisme' dan lebih berfokus pada upaya diplomasi bilateral karena kurangnya respons global yang efektif terhadap pandemi.³ Sentimen tersebut merefleksikan tren populisme dan proteksionisme yang semakin berkembang di seluruh dunia.

Dalam hal ini, KTT ASEAN ke-36 yang akan datang berfungsi sebagai momen yang tepat untuk menjawab keraguan itu dan untuk menunjukkan relevansi multilateralisme - yang diwakili oleh ASEAN - dan globalisasi - sebagaimana yang diinginkan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN. Multilateralisme dan globalisasi justru akan menjadi lebih penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemajuan menuju pengembangan dan produksi vaksin, misalnya, hanya akan dicapai sebagai hasil kerjasama di antara ilmuwan top dunia. Stabilitas pasar dan lapangan pekerjaan hanya akan kembali setelah langkah-langkah ekonomi yang dibutuhkan diadopsi oleh aktor-aktor ekonomi penting dunia. Persediaan makanan yang tidak terganggu dan terjangkau hanya akan tersedia jika perdagangan lintas batas dibuka kembali dan tetap dibiarkan terbuka untuk seterusnya. Indonesia telah menekankan poin-poin ini melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menggunakan berbagai platform multilateral untuk menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁴ Sangat mungkin bahwa KTT ASEAN ke-36 akan digunakan secara serupa oleh Indonesia untuk mengedepankan keprihatinannya pada poin-poin tersebut. Pada sebuah konferensi pers yang diadakan pada 17 Juni 2020, seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa Presiden Joko 'Jokowi' Widodo akan membahas masalah COVID-19 dan pemulihan pasca-pandemi.⁵

Isu-isu yang Menjadi Agenda

Pada saat penulisan artikel ini, belum diketahui apa yang akan menjadi agenda pada KTT ASEAN ke-36 karena masih difinalisasi oleh Vietnam sebagai ketua tahun ini. Namun, dalam sebuah jumpa pers, Jose Tavares, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN di Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan bahwa di antara isu-isu sementara yang akan dibahas oleh para pemimpin adalah: (1) tinjauan jangka menengah ASEAN *Community Vision 2025*; (2) masalah regional dan global; dan (3) hubungan eksternal.⁶ Poin terakhir ini akan menarik untuk diikuti, mengingat bahwa awal bulan ini Inggris mengajukan untuk menjadi mitra dialog ASEAN karena berusaha untuk membangun kehadirannya





pasca-Brexit di Asia Tenggara.⁷ Moratorium mitra dialog baru telah diberlakukan sejak tahun 1999 dan meskipun Inggris menghadirkan opsi yang menarik bagi ASEAN, tidak diketahui seberapa besar kemungkinan bagi ASEAN untuk mengubah kebijakan moratorium tersebut.

Selain dari tiga masalah besar tersebut, Jose Tavares memberikan pengarahan kepada media bahwa para pemimpin ASEAN akan mengadakan tatap muka dengan perwakilan pemuda, *ASEAN Business Advisory Council (ABAC)*, dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, serta mengadakan KTT Khusus tentang Pemberdayaan Perempuan.⁸ Mengingat ASEAN sering dikaitkan dengan label 'elitist', kegiatan ini sangat positif dan menunjukkan bahwa ASEAN terus berupaya mewujudkan visi "*people-centered, people-oriented*".

Keterbatasan Virtual

Adopsi teknologi yang cepat oleh ASEAN untuk mengatasi pembatasan yang diberlakukan karena pandemi COVID-19 juga sangat menggembirakan. Pada bulan April 2020, para Menteri Luar Negeri ASEAN telah mengadakan pertemuan *ASEAN Coordinating Council ke-25*, sementara para pemimpin ASEAN mengadakan *Special Summit* dan *ASEAN Plus Three Special Summit*, semuanya melalui konferensi video. Namun, terdapat keterbatasan ketika mengadakan pertemuan secara virtual, terutama dalam hal seluk beluk diplomasi dan negosiasi. Hubungan personal, bahasa tubuh, dan '*gentlemen's agreements*' tidak dapat dengan mudah ditiru secara virtual. Pertemuan secara virtual juga cenderung membatasi diskusi yang jujur dan terbuka karena adanya kekhawatiran tentang privasi di ruang-ruang pertemuan virtual. Mengingat kekhawatiran tersebut, Indonesia telah menegaskan bahwa negosiasi tentang *Code of Conduct on the South China Sea (COC)* tidak dapat dinegosiasikan secara virtual.⁹ Oleh karena itu, kecil kemungkinan akan ada kemajuan yang dibuat terkait COC, meskipun ada rencana awal untuk mengadakan empat pertemuan tahun ini dalam rangka menyelesaikan 'pembacaan kedua' teks konsep COC sebelum batas waktu 2021 tahun depan.

Responsif dan Kohesif?

Di tengah pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, sikap responsif dan kekompakan ASEAN sangat diperlukan. KTT ASEAN ke-36 akan menjadi kesempatan bagi kesepuluh negara anggota untuk membuktikan relevansi multilateralisme dan globalisasi tidak hanya dalam menghadapi konsekuensi multidimensional dari pandemi, tetapi juga dalam membentuk pemulihan pasca-COVID-19. Ketika Vietnam memilih 'ASEAN yang Responsif dan Kohesif' sebagai





tema kepemimpinannya, tidak ada yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2020 ini. Dapat dikatakan, visi tersebut tampak agak sederhana dan tidak begitu menginspirasi. Enam bulan memasuki tahun yang tragis ini, semua harapan bergantung pada hal itu: sebuah kawasan yang responsif dan kohesif.

Endnotes

- 1 Our World in Data (2020, June 22a). 'Country-by-country data on confirmed COVID-19 cases'. Retrieved from: <https://ourworldindata.org/covid-cases?country=IDN~BRN~KHM~LAO~MYS~MMR~PHL~SGP~THA~VNM> and Our World in Data (2020, June 22b). 'Total confirmed deaths: how rapidly have they increased compared to other countries?' Retrieved from: <https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=BRN~KHM~IDN~LAO~MYS~MMR~SGP~THA~VNM~PHL>
- 2 Nina Loasana (2020, June 19). 'COVID-19 forces RI to be self-sufficient in medical supplies.' The Jakarta Post. Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/paper/2020/06/18/covid-19-forces-ri-to-be-self-sufficient-in-medical-supplies.html>
- 3 Dian Septiari (2020, June 19). 'Post-pandemic foreign policy must change, former minister says.' The Jakarta Post. Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/19/post-pandemic-foreign-policy-must-change-former-minister-says.html>
- 4 Antara (2020, April 29). 'Indonesia calls for equitable access to COVID-19 drugs, vaccines.' Retrieved from: <https://en.antaranews.com/news/147171/indonesia-calls-for-equitable-access-to-covid-19-drugs-vaccines>
- 5 MoFA Indonesia (2020, June 18). 'Press Briefing (17/06/20): ASEAN Bersiap Pertemuan Tingkat Kepala Negara.' [YouTube Video]. Retrieved from: <https://www.youtube.com/watch?v=tRO77bxTWtQ>
- 6 *Ibid.*
- 7 Reuters (2020, June 6). 'UK seeks to boost post-Brexit ties with ASEAN partnership.' Retrieved from: <https://www.reuters.com/article/us-britain-politics-asean/uk-seeks-to-boost-post-brexit-ties-with-asean-partnership-idUSKBN23C32D>
- 8 MoFA Indonesia (2020, June 18). *Op.cit.*
- 9 Dian Septiari (2020, June 18). 'South China Sea rules cannot be negotiated virtually: Indonesian official.' The Jakarta Post. Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/18/south-china-sea-rules-cannot-be-negotiated-virtually-ri-official.html>





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560
Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212
Email: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id